

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia, lingkungan, dan sumber daya alam merupakan satu kesatuan alamiah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya bersifat saling menyeimbangkan. Mirsa (2012, hlm. 23) mengemukakan bahwa “faktanya sumber daya alam bersifat terbatas sebaliknya jumlah penduduk dan pola hidup kian meningkat sehingga memerlukan sumber daya alam yang semakin banyak”. Dalam hal ini salah satu kebutuhan yang meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk adalah kebutuhan akan ruang. Kebutuhan ruang merupakan salah satu jenis kebutuhan paling dasar manusia seperti kebutuhan fisiologis. “Kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik” (Feist, 2010, hlm. 331). Adapun menurut Goble (1987, hlm. 71) “kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur dan oksigen”. Tingginya permintaan terhadap permukiman ini sering terjadi di daerah perkotaan. Secara alamiah, manusia cenderung memilih untuk tinggal di wilayah dengan ketersediaan fasilitas hidup yang memadai untuk memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini, karakteristik wilayah dengan aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas yang memadai seringkali dimiliki oleh daerah perkotaan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Yunus (2010, hlm. 21), bahwa “tingginya jumlah penduduk di daerah perkotaan tersebut telah mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat dalam aspek fisik, sosial, politik, ekonomi, budaya, teknologi dan informasi”. Salah satu kebutuhan dasar yang meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk ini adalah kebutuhan permukiman.

Kebutuhan permukiman memiliki kedudukan yang sangat penting bagi setiap manusia sebagai tempat untuk berlindung dan membina kehidupan keluarga. Permukiman menurut Sumaatmadja (1988, hlm. 191) diartikan sebagai “bagian permukaan bumi yang dihuni manusia yang meliputi pula segala prasarana dan sarana yang menunjang kehidupan penduduk yang menjadi satu

kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan”. Dengan demikian, permukiman merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia dalam rangka melangsungkan kehidupan.

Pesatnya perkembangan wilayah dan tingginya jumlah penduduk di wilayah perkotaan turut terjadi di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di daerah Kecamatan Ngamprah. Kecamatan Ngamprah memiliki perkembangan pesat sejak adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Ngamprah yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 2007. Luas dari wilayah Kecamatan Ngamprah adalah 36,01 Km² dan dengan cakupan wilayah sebanyak 11 desa. Adapun nama-nama desa, jumlah rukun warga dan rukun tetangga yang termasuk wilayah administratif Kecamatan Ngamprah dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Daftar Nama Desa di Kecamatan Ngamprah

No.	Nama Desa	Dusun	RW	RT	KK	Luas (Km ²)
1	Cimareme	4	10	41	3.074	2,24
2	Gadobangkong	4	11	64	3.588	1,50
3	Tanimulya	5	25	158	8.339	2,30
4	Pakuhaji	3	12	40	2.247	3,17
5	Cilame	5	25	141	8.444	6,69
6	Margajaya	4	16	73	4.076	1,24
7	Mekarsari	3	10	38	3.155	1,97
8	Ngamprah	3	9	34	1.798	1,53
9	Sukatani	2	8	34	1.987	4,63
10	Cimanggu	4	15	40	1.996	6,12
11	Bojongkoneng	6	18	73	4.151	4,62
	Jumlah	43	159	736	42.855	36,01

Sumber: Kecamatan Ngamprah dalam Angka 2015

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung tahun 2000, jumlah penduduk Kecamatan Ngamprah berjumlah 60.396 jiwa. Sedangkan berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 berjumlah 154.166 jiwa dan berdasarkan data Statistik Daerah tahun 2015 jumlah penduduk Kecamatan Ngamprah terus bertambah menjadi 160.548 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-

laki sebanyak 81.461 jiwa dan penduduk perempuan 79.087 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini tidak terlepas dari peranan Kecamatan Ngamprah sebagai salah satu wilayah desa perkotaan di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan indikator klasifikasi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia, 9 dari 11 desa di Kecamatan Ngamprah sudah diklasifikasikan sebagai desa perkotaan. Adapun indikator yang digunakan dalam klasifikasi tersebut terdiri dari kepadatan penduduk per kilometer persegi (KPD), persentase rumah tangga pertanian (PRT), dan keberadaan atau akses untuk mencapai fasilitas perkotaan (AFU). Hasil klasifikasi desa di Kecamatan Ngamprah dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Klasifikasi Desa Perdesaan dan Desa Perkotaan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

No.	Nama Desa	Luas (Km ²)	Klasifikasi
1	Cimareme	2,24	Perkotaan
2	Gadobangkong	1,50	Perkotaan
3	Tanimulya	2,30	Perkotaan
4	Pakuhaji	3,17	Perkotaan
5	Cilame	6,69	Perkotaan
6	Margajaya	1,24	Perkotaan
7	Mekarsari	1,97	Perkotaan
8	Ngamprah	1,53	Perkotaan
9	Sukatani	4,63	Perkotaan
10	Cimanggu	6,12	Perdesaan
11	Bojongkoneng	4,62	Perdesaan

Sumber: Hasil Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan, BPS, 2010

Berdasarkan Tabel 1.2, sembilan wilayah desa perkotaan di Kecamatan Ngamprah antara lain Desa Cimareme, Desa Gadobangkong, Desa Tanimulya, Desa Pakuhaji, Desa Cilame, Desa Margajaya, Desa Mekarsari, Desa Ngamprah, dan Desa Sukatani. Sedangkan yang masih termasuk ke dalam klasifikasi desa perdesaan hanya Desa Cimanggu dan Desa Bojongkoneng. Munculnya desa-desa perkotaan di Kecamatan Ngamprah telah mendorong tingginya permintaan terhadap kebutuhan permukiman di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan

Nenden Sumarni, 2017

KUALITAS HIDUP PENDUDUK DI SEKITAR PERMUKIMAN TERATUR KECAMATAN NGAMPRAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

banyaknya pembangunan permukiman teratur oleh para pengembang. “Permukiman teratur adalah kelompok permukiman dengan tata letak bangunan yang teratur dan terencana yang terbentuk dan berkembang selaras dengan pola jaringan jalannya, serta dilengkapi dengan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan” (Badan Pertanahan Nasional, 2014). Adapun sejumlah permukiman teratur yang ada di Kecamatan Ngamprah dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Daftar Permukiman Teratur di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

No.	Nama Permukiman Teratur	Lokasi Desa
1	Batu Indah Regency	Cilame
2	Bukit Cipageran Indah	Tanimulya
3	Bukit Permata	Cilame
4	Bumi Pakusarakan I	Tanimulya
5	Bumi Pakusarakan II	Tanimulya
6	Cilame Indah	Cilame
7	Cilame Permai	Margajaya
8	Cimareme Indah	Cimareme
9	Graha Bukit Raya	Cilame
10	Griya Asri Pakusarakan	Tanimulya
11	Komplek Permata	Tanimulya
12	Lembah Parahyangan	Cilame
13	Pakuhaji Indah	Pakuhaji
14	Permata Cimahi	Tanimulya
15	Perumahan ITB BRP	Cilame
16	Pesona Fadjar Asri	Tanimulya
17	Pesona Lembah Cidahu	Tanimulya
18	Pondok Mas Lestari	Margajaya
19	Priangan Endah Cilame	Cilame
20	Taman Bunga Cilame	Mekarsari
21	The Awani Residence	Gadobangkong

Sumber: Dinas Cipta Karya Kabupaten Bandung Barat, 2016

Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut, terdapat 21 (dua puluh satu) kompleks permukiman teratur yang terdapat di Kecamatan Ngamprah. Banyaknya permukiman teratur yang dikelola oleh pengembang di Kecamatan Ngamprah

tidak dapat terlepas dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara. Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disebut KBU adalah kawasan yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi dengan sebelah utara dan timur dibatasi oleh punggung topografi yang menghubungkan puncak Gunung Burangrang, Masigit, Gedongan, Sunda, Tangkubanparahu dan Manglayang, sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh garis (kontur) 750 m di atas permukaan laut (dpl). Menurut Peraturan Daerah No.1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, wilayah Kecamatan Ngamprah yang termasuk KBU antara lain sebagian Desa Ngamprah, Desa Tanimulya, Desa Cilame, Desa Cimanggu, Desa Bojongkoneng, Desa Mekarsari, Desa Pakuhaji, dan Desa Sukatani. Fungsi kawasan resapan atau kawasan lindung dengan persentase lebih banyak sangat dianjurkan untuk diterapkan di kawasan KBU khususnya daerah Ngamprah. Meski demikian, keberadaan permukiman teratur sangat banyak terlihat khususnya di daerah Desa Tanimulya dan Desa Cilame.

Dalam hal ini, pesatnya pembangunan permukiman teratur tersebut seringkali menimbulkan alih fungsi lahan dan berubahnya mata pencaharian penduduk. Hal ini dimungkinkan menimbulkan variasi terhadap kualitas hidup penduduk setempat. Pembangunan idealnya tidak menurunkan kualitas hidup penduduk, tetapi meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup penduduk yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Faturochman (1990, hlm. 3) bahwa “saat ini yang terpenting adalah adanya kesepakatan bahwa arah pembangunan tidak hanya pada peningkatan kuantitas (fisik, bangunan) tetapi juga kualitas (hidup, manusia)”. Akan tetapi, adanya kecenderungan untuk menyelaraskan pembangunan permukiman teratur dengan kualitas hidup penduduk setempat seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini dikarenakan pembangunan permukiman teratur oleh para pengembang hanya terkonsentrasi di lokasi-lokasi tertentu yang dianggap sebagai lokasi yang strategis dan persebarannya pun tidak merata. Akibatnya, permukiman teratur berkembang dengan membentuk pola-pola tertentu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan

oleh Adisasmita (2010, hlm. 70) bahwa “permukiman penduduk cenderung mengikuti tersedianya jaringan transportasi. Jaringan transportasi inilah yang nanti akan berperan dalam terbentuknya pola-pola permukiman”. Ketidakmerataan pola permukiman teratur dan keleluasaan yang diberikan pemerintah setempat kepada para pengembang swasta justru menyebabkan tersisihnya penduduk yang tidak bertempat tinggal di kawasan permukiman teratur. Rahardjo (2005) memperjelas bahwa:

“...akibatnya tanah dianggap sebagai barang atau komoditas yang dikuasai pengembang, sebaliknya kepentingan penduduk lokal atas tanah sebagai tempat bekerja kurang mendapat perhatian dan kebutuhannya sebagai pelaku pembangunan pasif terabaikan, sehingga pada umumnya mereka bertambah miskin dan kualitas hidupnya rendah”.

Dengan adanya temuan demikian, banyaknya permukiman teratur yang berkembang di Kecamatan Ngamprah dimungkinkan memberikan variasi pada kualitas hidup penduduk di sekitarnya. Keberadaan permukiman teratur diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi para penghuninya maupun penduduk di sekitarnya. Penelitian ini akan mencoba mengungkap kualitas hidup penduduk yang tinggal di permukiman teratur dan yang ada di sekitarnya guna memperoleh gambaran analisis yang lebih akurat dan mendalam.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Menurut Tika (2005, hlm. 17) “masalah perlu dibatasi agar peneliti dapat membatasi diri pada apa saja yang perlu dan tidak perlu untuk diteliti”. Inti dari penelitian ini terletak pada analisis kondisi kualitas hidup penduduk di sekitar permukiman teratur yang ada di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Untuk membatasi kajian penelitian, maka perlu dibuat beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimanakah sebaran permukiman teratur di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung keberadaan permukiman teratur di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat?

3. Bagaimanakah kondisi kualitas hidup penduduk di sekitar permukiman teratur Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi sebaran permukiman teratur di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberadaan permukiman teratur di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
3. Mendeskripsikan kondisi kualitas hidup penduduk di sekitar permukiman teratur Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Sebagai gambaran analisis mengenai kondisi kualitas hidup penduduk di sekitar permukiman teratur berkembang di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
2. Sebagai bagian dari proses penerapan ilmu kegeografian dalam kajian Geografi Manusia (*Human Geography*) yakni aspek kajian permukiman dan kualitas hidup.
3. Bagi masyarakat pada umumnya sebagai informasi mengenai pengaruh dari berkembangnya permukiman teratur teratur.
4. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat untuk keperluan pengembangan wilayah dan pengembangan sumber daya manusia Kecamatan Ngamprah di kemudian hari.

E. Struktur Organisasi Skripsi

1. Bab I Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang yang menjadi faktor pendorong diadakannya penelitian ini. Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya kawasan

permukiman teratur yang ada di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Selain latar belakang, pada bab ini mencakup pula rumusan masalah yang terdiri dari tiga fokus utama yakni sebaran permukiman teratur, faktor pendukung perkembangan permukiman teratur, dan kondisi kualitas hidup penduduk di sekitar permukiman teratur. Untuk melengkapi rumusan masalah, pada Bab I ini disajikan pula tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang diharapkan dapat tercapai dengan adanya penelitian ini.

2. Bab II Kajian Pustaka

Bab II berisi berbagai referensi terkait topik penelitian yang dilakukan. Referensi ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen pemerintah, maupun penelitian-penelitian terdahulu yang pernah diadakan sebelumnya oleh peneliti lain tetapi masih dalam topik yang sama. Adapun teori dan konsep yang dikutip di antaranya seperti konsep kualitas hidup, definisi kualitas hidup beserta indikatornya, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan sebaran permukiman di permukaan Bumi. Untuk referensi penelitian terdahulu yang diambil penulis masih dalam topik yang sejenis yaitu terkait kualitas hidup meskipun dari berbagai latar belakang keilmuan yang beragam.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada Bab III ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian dimulai dari desain penelitian, teknik pengumpulan data, variabel, teknik pengambilan populasi dan sampel serta teknik analisis data untuk memperoleh hasil akhir penelitian yang bersifat faktual. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penerapan metode ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu keadaan sebagaimana adanya di lapangan, mengungkap fakta-fakta serta fenomena yang menjadi topik penelitian melalui deskripsi secara sistematis, akurat dan faktual.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan. Pada bab ini tersaji hasil perolehan data dari lapangan dan deskripsi analisis penulis terkait pertanyaan penelitian yang sebelumnya dicantumkan pada sub bab rumusan masalah. Adapun yang menjadi fokus pembahasan adalah deskripsi sebaran permukiman teratur, faktor pendukung berkembangnya permukiman teratur dan gambaran kondisi kualitas hidup penduduk di sekitar permukiman teratur yang ada di daerah penelitian. Pemaparan pada bab ini disajikan dalam bentuk deskripsi teks, tabel, grafik, serta beberapa peta yang dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian yang telah diperoleh.

5. Bab V Kesimpulan

Bab V berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan ini berisi inti dari hasil penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya pada bagian rumusan masalah. Selain berisi kesimpulan, bab ini juga menyajikan beberapa rekomendasi yang dirumuskan penulis terkait hasil penelitian yang dijumpai di lapangan. Rekomendasi yang dibuat ditujukan bagi pemerintah daerah setempat maupun masyarakat yang berinteraksi langsung dengan kawasan permukiman teratur. Adapun rekomendasi lainnya ditujukan untuk kepentingan pendidikan di mana penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk materi yang berkaitan dengan kondisi ruang dan aktivitas manusia di sekitarnya.